



RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
DEWAN KELAUTAN INDONESIA SERTA PERUM BULOG

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	9
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
		Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan	:	Dihadiri oleh Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), dan Dirut PT Garam (Persero).
Hari, Tanggal	:	Selasa, 18 Juni 2019
Waktu	:	10.00 s.d 14.00 WIB
Acara	:	1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I; 3. Tindak Lanjut Hapsem BPK Semester II Tahun 2018; dan 4. Isu-Isu Penting Aktual Bidang Kelautan dan Perikanan.
Ketua Rapat	:	Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	34 dari 47 Anggota
Hadir Mitra Kerja	:	1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan); 2. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan); 3. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal); 4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap); 5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal

- Perikanan Budidaya);
6. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, S.T. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
 7. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
 8. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan); dan
 9. Dr. Agus Suherman (Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) .
- beserta jajaran.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
4. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
5. DANIEL JOHAN
6. SUDIN
7. Drs. I MADE URIP, M.Si.
8. Ir. MINDO SIANIPAR
9. ONO SURONO, S.T.
10. Ir. EFFENDI SIANIPAR
11. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
12. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
13. RIDWAN ANDI WITTIRI
14. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
15. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
16. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
17. Ir. EDDY KUNTADI
18. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
19. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
20. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
21. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
22. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
23. Drs. H. UMAR ARSAL
24. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
25. Drs. H. IBNU MULTAZAM
26. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
27. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
28. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
29. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
30. Hj. KASRIAH

31. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
32. Drs. H. HASANUDDIN, A.S., M.Si.
33. SULAEMAN L. HAMZAH
34. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

ANGGOTA YANG IJIN:

1. Ir. TAGORE ABUBAKAR
2. DJENDRI ALTING KENJEM, S.H., M.H.
3. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
4. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
5. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
6. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
7. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
8. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
9. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
10. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
11. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
12. Drs. FADHOLI
13. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (VIVA YOGA MAULADI, M.Si.):

Bismillahirrahmaanirrahiem

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat Pagi,
Shalom,
Salam Sejahtera Buat Kita Semuanya,
Om Swastiastu Namu buddhaya

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Direktur Umum Perum Perikanan Indonesia, Saudara
Direktur Umum PT Garam, Saudara Direktur Umum Direktur Utama
PT Perikanan Nusantara serta hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, Rakhmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja pada pagi hari ini dalam sehat wal afiat guna melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing sebagai pemerintah dan sebagai anggota DPR.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus

antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 20 Maret 2019 dan Keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada tanggal 14 Mei 2019 serta menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI nomor AG06910DPR2019 tanggal 8 Mei 2019 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2.020 dan RKP tahun 2.020.

Pada hari ini, Selasa 18 Juni 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas RKA K/L dan RKP K/L tahun anggaran 2.020 evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan pertama ditindak lanjut biar ikhtisar hapsem BPK Semester II tahun 2018 serta beberapa isu-isu penting lainnya.

Sebelum dilanjutkan rapat dalam suasana masih bulan syawal kami mengucapkan *Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Taqaballahu Ya Karim*, Selamat Idul Fitri 1440 Hijriyah Mohon Maaf Lahir dan Batin. Bila ada salah-salah mohon dimaafkan baik disengaja maupun tidak disengaja, setelah lebaran kita kembali ke fitri, buat ke bapak-bapak jangan ke yang lain ke fitri saja. Jangan kemana gitu, ke fitri saja.

Bapak ibu yang kami hormati

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI telah hadir 24 dari 47 Anggota terdiri dari berapa fraksi, 9 fraksi dari 10 fraksi. Sesuai dengan ketentuan 246 dan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR maka sudah, kalau bahasa Maduranya *showroom, quorum*. Sudah *showroom* gitu, rapat kerja dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA)

KETUA RAPAT:

Sesuai undangan rapat pada pagi hari ini dimulai pukul 10, ini agak molor dan nanti akan menyesuaikan jadwalnya. Bu Menteri nanti jam 1 ada rapat ya? Satgas? Ya diusahakan jam 1 pas sudah selesai kalau belum selesai ditambah sedikit, apabila belum selesai nanti dilanjutkan lagi. Adapun acara rapat pada pagi hari ini akhirnya sebagai berikut;

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai RKA K/L dan RKP K/L tahun anggaran 2020 evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tindak lanjut ikhtisar hapsem BPK semester II tahun 2018 serta isu-isu penting lainnya,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban atas tanggapan Anggota Komisi IV,
5. Kesimpulan Rapat, dan yang ke
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Bapak Ibu yang kami hormati.

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 mendapat predikat WTP, Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, tidak sampai *Hattrick* Bu ya, gitu, Alhamdulillah. Jadi ini prestasi yang luar biasa untuk diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjamin keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama yaitu nelayan, pemberdaya ikan, petambak garam serta pengolah dan pemasar melalui regulasi kemudian stabilitas politik keamanan serta pertumbuhan ekonomi yang diupayakan akan terus selalu meningkat dan bisa memberdayakan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Hal ini agar pembangunan infrastruktur, tingkat konsumsi, kelangsungan usaha dan investasi dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020, pagu indikatif dari 87 Kementerian Lembaga sebesar 853.983,5 miliar sementara untuk alokasi anggaran pagu indikatif Kementerian Kelautan sebesar triliun kali ya ini ya? triliun sebesar 6,6 triliun 472 miliar koma 8 juta rupiah artinya anggaran KKP tidak lebih dari 1 % dari alokasi RAPBN tahun 2020, masih 1 % Bu tidak lebih, jadi ini harus diperjuangkan terus agar ditingkatkan.

Selanjutnya jika alokasi anggaran KKP tahun 2020 dibandingkan dengan pagu definitif tahun 2019 sebesar 5 triliun 483 miliar rupiah terlihat mengalami kenaikan sebesar 18,05 % atau 999 miliar, 998,8 miliar. Selain itu kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait dengan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2018.

Hadirin yang berbahagia, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai beberapa isu penting.

Yang pertama hasil laporan keuangan pemerintah pusat LKPP dari BPK untuk KKP antara lain potensi BNPB yang tidak terealisasi karena adanya pencatatan kematian ikan yang tidak didokumentasikan dengan baik atau tanpa diotorisasi oleh kuasa pengguna barang sebesar 3,5 miliar, piutang pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan Nasional kejawan sebesar 33 miliar berpotensi tidak tertagih.

Dua, bagaimana strategi KKP dalam menumbuh kembangkan industri perikanan yang ada baik kerja sama dengan BUMN maupun swasta mengingat produksi perikanan tahun 2019 triwulan I mengalami kenaikan sebesar 3,03 % jika dibandingkan dengan produksi perikanan triwulan I tahun 2018.

Tiga, bagaimana peran BUMN, Kelautan dan Perikanan yaitu Perinus, Perindo, Garam dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Dan nanti bisa ditambah oleh anggota yang lain beberapa hal penting menyangkut soal materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini.

Saudara-Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan, Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilahkan, kepada Saudari Menteri untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilahkan Bu Menteri.

F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, interupsi pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya pernah mendengar Dirjen Tangkap mengatakan beberapa bulan lalu, tidak perlu *lobby lobby* DPR, saya minta penjelasannya disini, kalau anda tidak mau diawasi oleh DPR, anda jangan jadi Dirjen, tolong dijelaskan, dan ini dikemukakan waktu di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumpulkan pengusaha kapal tangkap, saya tidak pernah minta tolong sekalipun, tolong dijelaskan, terimakasih.

KETUA RAPAT:

Bisa dijelaskan sebentar biar untuk klarifikasi.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Mohon izin Ibu, sebentar.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waabarakatuh

Yang kami hormati Pak Sudin.

Jadi konteks yang kami kilaskan dalam ketika berdiskusi dengan para pelaku usaha itu agar proses perizinan yang dulunya itu banyak *lobby*, banyak makelar, banyak calo dari berbagai pihak, itu tidak ada lagi Pak. Konteksnya jadi kesitu, jadi secara umum dulunya itu pelaku usaha hampir tidak pernah mengurus sendiri, dia melalui kemana-mana, nah ini yang kami tegaskan bahwa tidak perlu ada *lobby lobby* lagi karena kami sudah menerapkan sistem *e-service* juga online sehingga dengan mengirimkan dokumen saja proses sudah bisa dilakukan.

Demikian keterangan singkat yang, terima kasih.

F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, yang bersangkutan menyebutkan DPR, saya mau tanya apa ada anggota DPR jadi calo disini? Tolong sebutkan. Saya tidak pernah minta tolong sama

siapapun masalah izin dan lain-lain karena kami bukan calo dan presiden mengatakan untuk mengurus izin 3 hari sampai hari ini berapa banyak yang mangkrak perizinannya? Mereka ngadu ke saya, saya katakan jangan ngadu ke saya, urus aja sendiri. Jadi kalau rakyat ngga bisa sama DPR, terus ngadunya sama siapa? Orang anda menyebutkan DRR kok, jadi jangan lari-lari. Bos, anda tidak berkeringat untuk Jokowi tapi kami berkeringat, partai. Ya, tolong saya menghormati anda, anda hormati kita juga, kita mitra. Ya, terimakasih.

KETUA RAPAT:

Ya, tabayyunnya, saya rasa ini penting karena biar dalam bermitra kita ada hubungan yang baik, ada hubungan yang sinergi untuk selalu menjaga, atensensi dan kehormatan kita masing-masing, ya, gitu ya. Silahkan, terimakasih Pak Sudin, silahkan Bu Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SUSI PUDJIASTUTI):

***Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Selamat Pagi,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI yang hadir pada rapat kerja hari ini tanggal 18 Juni 2019.

Dalam suasana idul fitri dengan ini saya juga memohon maaf atas nama pribadi yang selaku Menteri Kelautan dan Perikanan atas nama seluruh Korps, Departemen Kementerian Kelautan dan Perikanan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah Mohon Maaf Lahir dan Batin, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meRidhoi dan menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal'alamin.

Sesuai dengan agenda rapat kerja pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan penjelasan mengenai;

1. Pembahasan rencana kerja KKP tahun 2020.
2. Evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2019.
3. Tentang tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2018 dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018.
4. Isu-isu penting kelautan dan perikanan.

Sedikit mungkin saya menjelaskan tentang hal yang barang kali berkaitan dengan tadi Pak Sudin kepada keberatan atas *statement* dari Pak Zulficar, jadi Bapak Ketua dan seluruh anggota sekalian, memang perikanan tangkap ini menjadi hal yang sangat sulit dalam hal tata kelola bukan hal yang mudah karena memang kita melakukan *reform* yang sangat besar, barangkali tidak ada negara yang melakukan reformasi begitu besar dalam sebuah bidang tata kelola industri perikanan terutama perikanan tangkap.

Dua tahun terakhir memang isu atas perizinan ini menjadi isu yang sangat panas bergulir semua tekanan, semua goyang, isu itu adalah selalu dari perikanan tangkap. Dari mulai isu cantrang, dari mulai isu *distract fishing* dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentang tata kelola pajak yang tidak sesuai dengan PDB, yang dihasilkan dari Perikanan juga PNBP dan lain sebagainya.

Untuk itulah dalam dua tahun terakhir saya melakukan langkah-langkah penguatan dalam hal tata kelola ini, dan ternyata dari hasil tata kelola terutama satu tahun terakhir, saya juga memohon kepada Pak Presiden yang mana diawal itu memang dimengerti oleh kebanyakan Instansi menyulitkan para pengusaha perikanan tapi sebetulnya kita ingin melakukan transparansi dan peningkatan pelaporan hasil tangkapan dari pada pelaku industri tangkap. Memang tidak mudah menyelesaikan persoalan yang sudah terbiasa bertahun-tahun, dimana dalam pengetatan perizinan ini kita sebetulnya bukan mempersulit tapi ingin pengusaha mulai jujur karena prestasi kita dipertanyakan. Kamu tenggelamkan kapal begitu banyak, kemudian ribuan kapal sudah pergi, peningkatannya Cuma 10 %, 11 % dalam 1 tahunnya. PNBP juga meningkat dari 300 miliar menjadi 600 miliar, pajak sudah meningkat dari 300 sampai 1,5 triliun. Tetapi, kalau dilihat dari apa yang harusnya kita dapatkan dengan perginya lebih 10 ribu kapal asing juga bertambahnya stok ikan dilaut itu tidak berbanding dan ternyata dari hasil sampling kita ditahun 2018 awal itu kita dapatkan dari 1.000 kapal yang kita verifikasi itu kita mendapatkan tambahan hasil tangkapan yang dilaporkan 1 juta ton. Jadi kita bisa bayangkan, kita bereskan 7.000 kapal itu berapa juta ton dan itu kalau kita ngomong 1 juta ton saja dikali 14 ribu perak per/kilo ikan itu berarti yang terlaporkan saja sudah 1 miliar dollar lebih.

Jadi, memang tidak mudah untuk kembali menata kelola dan kita juga mendapatkan bukti di lapangan, orang yang punya kapal 20 izinnya cuma 2, 3, bahkan dalam 1 seminar saya dan Bu Menteri Keuangan itu dengan pengusaha kapal itu barangkali mungkin untuk sekedar informasi saja, kita tanya ada pengusaha mengeluh, izinnya sulit, ya saya bilang bapak kapalnya berapa? ukurannya berapa? saya sama Bu Menkeu di depan forum ada 700an pengusaha pemilik kapal. Dia jawab, mungkin 2. Jawabannya itu mungkin 2. Bu Menkeu dan saya bilang, wah *iki sendalku tak balangke wae soko kene*, gitu kan Pak, karena bagaimana bisa kapal yang diurus KKP itu kan yang diatas 30 GT. Kalau kapal 30 GT, dari sana sampai sana kira-kira Pak ukurannya besarnya, memang 20 meter, masa jawabannya mungkin dua, jadi dari situ ya ya, ya kita juga kenceng karena kita dikritik terus, rasio pajaknya perikanan itu kecil sekali dibandingkan PDB jadi ya kita harus membereskan persoalan-persoalan ini jadi kita bekerja sama dengan pajak dengan semua untuk meraup satu persatu diverifikasi jadi memang barang kali kadang-kadang ya saya mengerti semua yang ada di KKP mendapat tekanan kanan-kiri, karena kesulitan misalnya dari 200 ton laporan suruh perbaiki naik 250 ton, padahal target kita maunya dia jujur saja 1.000 ton ya 1.000 ton. Kan KKP tidak memungut pajak, kita hanya PNBP saja. Tapi memang membuat membuat transparansi dalam dalam sektor bisnis perikanan tangkap ini tidak mudah jadi saya mohon maaf atas nama Kementerian Kelautan Perikanan Pak Sudin, kalau ada pernah terucap seperti itu tapi saya pikir maksud negatif tidak ada lah saya pikir ini, semua juga karena stres kita mengejar target-target *achievement achievement* yang memang harus kita lakukan karena kalau tidak dengan jumlah tangkap yang begini bikin iri dunia kuota dan sebagainya kita bikin bisa bisa bisa diserang kanan-kiri dan takutnya nanti Indonesia dianggap tidak

patuh kepada reported, and regulated fishing yang sudah menjadi standart dunia nanti di pasar kita dapat kartu kuning lah, apa lah, jadi saya yakin tidak ada maksud jelek apapun untuk itu saya mohon maaf atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kembali kepada agenda kerja pada hari ini.

F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan. Pimpinan interupsi.

KETUA RAPAT:

Silahkan, Pak Sudin.

F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Khusus di saya, sangat mendukung langkah Bu Susi, mengenai penertiban perizinan saya dukung. Mengenai tidak perlunya calo, itu sangat bagus sekali tetapi jangan mempersulit. Pengusaha memasukan formulir permohonan.

“Hey kamu punya, kurang 3 item, bawa pulang”.

Itu lebih jelas, jangan didiemin, digantung, coba tanya, udah ada yang 6 bulan belum keluar, dipanggil dibalikin berkasnya.

“Berkas kamu ngga komplit, urus lagi, saya ngga mau tau, dan kamu ngga perlu pakai-pakai main mata dengan oknum”.

Pengertian oknum itu baik diluar maupun didalam, itu yang penting, kepastian engga, udah stok kewajibannya iya sementara berkasnya ditumpuk, kan gampang si, apa susahny.

“Oh kamu punya, berkasnya kurang 3, kamu punya kamu penipu, karena apa? Ukuran GT nya kamu turunkan”.

Udah gampang, balikin aja dokumennya. Itu lebih baik cuma ditumpuk. Ini loh saran, saya sangat mendukung dengan hal yang Ibu katakan tadi.

Terimakasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nggih Bu Menteri, lanjut ke pembahasan ya, silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Key, nanti saya akan rapat tersendiri Pak Sudin untuk melihat apa yang terjadi, kemungkinan juga kemungkinan itu tidak nyampai kepada web nya KKP kemungkinan Pak, tapi kita akan teliti, perkenankan nanti saya membahasnya belakangan supaya saya bisa terus lanjut tentang.

KETUA RAPAT:

Pokoknya intinya Bu Menteri, jangan sampai kesalahan itu dari internal KKP, intinya disitu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya kalaupun ada ya kita akan perbaiki.

KETUA RAPAT:

Kalau ada kesalahan ya segera diperbaiki.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik, Pak.

KETUA RAPAT:

Agar *imagenya* nanti tahun 2019-2020 WTP lagi, kan gitu loh. Ya, silahkan Bu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

WTP kan itu sudah keharusan, Pak. Jadi sebetulnya untuk saya ya itu bukan prestasi luar biasa, itu memang kewajiban kita harus WTP, Pak. Tapi apresiasi atas kerja semua kawan-kawan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki dan juga dukungan dari DPR untuk supaya kita bisa menjadi WTP kembali.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para anggota Komisi IV yang saya hormati.

Rencana kerja anggaran KKP tahun 2020 sasaran utama pembangunan kelautan dan perikanan 2020 adalah pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9 yang akan didukung peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton, produksi garam 3 juta ton, NTN sebesar 115, tingkat konsumsi ikan di 56,39 kg perkapita. Nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,98 miliar dan jumlah kawasan konservasi perairan dinaikan menjadi 22,27 juta hektare.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Ka Bappenas, Menteri Keuangan B-241 dan S-338 29 April 2019 perihal pagu indikatif K/L tahun 2020, KKP memperoleh pagu indikatif 2020 sebesar Rp 6,472 triliun.

Rancangan usulan pagu indikatif 2020 berdasarkan unit eselon yaitu Sekretariat Jenderal Rp 523,62 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 77,27 miliar, DJPT Perikanan Tangkap Rp 726,55 miliar, Perikanan Budi Daya 73,57 miliar, Dirjen Pengawasan SDKP Rp 1,06 triliun, Penguatan Daya Saing Rp 366 miliar, Pengelolaan Ruang Laut Rp 507 miliar, Badan Riset dan SDM sebesar Rp 1,87 triliun, Badan Karantina sebesar Rp 601,08 miliar.

Selanjutnya pagu indikatif digunakan untuk rancangan kegiatan prioritas;

1. Program pengelolaan perikanan tangkap antara lain batuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, fasilitas sertifikat atas hak tanah nelayan, sertifikasi awak kapal, serta operasional SKPT di 4 lokasi.
2. Program pengelolaan budi daya untuk diperuntukan untuk bantuan benih, kebun, bibit rumput laut, excavator dan bioflok mina padi, pakan mandiri dan operasional SKPT di 3 lokasi.
3. Program pengelolaan ruang laut untuk pembangunan dermaga apung kawasan wisata bahari integrasi pergaraman, sarana niaga garam rakyat, pengelolaan kawasan konservasi perairan, sertifikasi pulau terluar dan operasional SKPT di 4 lokasi.
4. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diperuntukan untuk antara lain *ice flake machine cold storage*, rantai dingin, pasar ikan, central kuliner, gemar makan ikan, promosi produk, operasional SKPT di 2 lokasi.
5. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperuntukan untuk operasional kapal pengawas, pesawat patroli, operasional sistem pemantauan sumber daya kelautan perikanan satgar pemberatasan ilegal fishing, pembangunan kapal pengawas, speedboat, pengawas dan *sea rider* dan pembinaan pokmaswas.
6. Program riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, sertifikasi kompetensi, operasional tenaga penyuluh perikanan, kajian stok sumber daya ikan, perairan umum dan daratan, inovasi teknologi adaptif, sarana prasarana riset.
7. Program karangtina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan antara lain penanganan kasus pelanggaran karangtina, keamanan hayati, operasional ekspor import domestik, pengawasan mutu, sarana prasarana pelayanan.
8. Program pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP diperuntukan untuk pengawasan internal mitra inspektorat 1 sampai dengan 5
9. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya diperuntukan untuk lain produk hukum, penataan organisasi SDM, perencanaan pengelolaan administrasi PBJ, pengelolaan hubungan masyarakat, kerja sama luar negeri, data statistik informasi serta operasional BLU.
10. Evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I 2019.

Bapak ketua, Bapak Wakil Ketua dan para anggota Komisi IV DPR RI.

Terkait agenda pembahasan kedua, izinkan saya sampaikan realisasi APBN 2019 dengan sampai dengan 13 Juni 2019 termasuk outstanding kontrak sebesar Rp 1,91 triliun atau 34,76 dari pagu total KKP sebesar Rp 5,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, pada periode yang sama sebesar Rp 30,38 triliun, 30,38 %. Realisasi 2019 telah menunjukkan perbaikan penyerapan anggaran APBN. Tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II 2018 dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari laporan Keuangan Pemerintah Pusat KKP telah menindak lanjuti ikhtisar Semester II tahun 2018 sebagai berikut;

1. Untuk kormaps CTA project mulai 19 Juni 2017 telah berpindah ke LIPI selaku *axecuting agency* untuk Grant TF015470 tahun 2017 di KKP dan telah di audit BPK dengan opini WTP dan semua rekomendasi telah dinyatakan sesuai saran oleh BPK pada semester 2 2018.
2. Untuk pengelolaan bantuan program kapal perikanan telah dikeluarkan beberapa instruksi Menteri kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk menindaklanjuti MoU Menteri Perhubungan, Percepatan, Penerbitan Dokumen, Kapal Perikanan khususnya Kapal Bantuan melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat penyelesaian dokumen kapal bantuan dan menetapkan mekanisme pemanfaatan kapal ketika terjadi gagal operasi.

Selanjutnya tindaklanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat kami sarankan kami dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk temuan tentang potensi PNBP terdiri tidak terealisasi dilakukan pencatatan kematian sebesar Rp3.500.000.000,00
 - a. KPP menerbitkan dan mensosialisasikan Per Dirjen Perikanan budidaya Nomor 86 2019 21 Maret 2019 tentang Pedoman Umum Penata Usahaan Barang Persediaan Kegiatan Produksi dan Perekayasaan di UPT lingkup BCPB.
 - b. Menetapkan SOP dan meningkatkan pengendalian pengelolaan PNBP di UPT lingkup BCPB.
2. Untuk temuan piutang dan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di PPN Kejawan sebesar Rp33.000.000.000,00 berpotensi tidak tertagih dapat kami sampaikan, utang PNBP pada Sekretariat di JPT telah sebesar 1896 terdapat adanya perbedaan sisa nilai utang dalam laporan keuangan dari 2011 sampai 2018 dengan buku kas umum bendahara dan aplikasi pelayanan PNBP simpanan simponi sehingga sisa utang seharusnya 1785 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
 1. Telah melakukan pemetaan piutang yang bisa ditagihkan dan tidak bisa ditagihkan. Terhadap yang bisa ditagihkan 1,611794899 dilakukan proses penagihan, sedangkan yang tidak bisa ditagihkan sebesar Rp16.000.000.000,00 akan dikoordinasikan BPK dengan tindaklanjut mengingat tunggakan-tunggakan dimaksud berasal dari Kapal Ikan Indonesia yang sudah tidak aktif dan Kapal Ikan Ex Asing yang sudah tidak beroperasi lagi.
 - a. Untuk piutang PNBP salter PPN Kejawan Cirebon kepada China Ocean Industri sebesar 14,7007 telah dilimpahkan penagihan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di Cirebon.
 - b. Isu penting kelautan dan perikanan terkait dengan isu penting dapat kami laporkan kesempatan ini laju pertumbuhan PDB Perikanan triwulan I

2019 year on year sebesar 5,67% lebih tinggi daripada PDB kelompok pertanian yang hanya 1,81% dan PDB Nasional yang hanya 5,07%.

- c. Nilai PDB Perikanan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan menjadi 62,31 triliun pada triwulan I 2019 dan 5 58,97% triwulan 2018, dan bila tata kelola perizinan ini kami bisa laksanakan dengan penuh dan dan betul maka diperkirakan PDB Perikanan itu peningkatannya bisa menyampai bahkan 100% daripada yang ada sekarang. Namun tata kelola ini memerlukan kemauan dan *good will* bersama dari seluruh instansi untuk bisa me me me mengerti dan memaklumi dan memahami bahwa tata kelola ini penting untuk melihat ekonomi perikanan dan kelautan yang sebenarnya. Yang seutuhnya sehingga unreported dan di e dibawah pelaporan itu angka-angka bisa diperbaiki.
2. Total produksi perikanan yang triwulan I mencatat 6,56 juta ton, bila tata kelola ini juga di betulkan maka kenaikan yang sebesar 3,03% ini bisa naik 2 kali lipatnya dibandingkan yang ada sekarang 6,37 juta ton.
3. Volume ekspor pun sama ditahun 2019 naik sebesar 6,24 jika dibandingkan dengan triwulan 2019, jika tata kelola dalam nilai ekspor pun bisa di verifikasi dengan benar maka nilai ekspor pun bisa naik lebih daripada 6,24%. Sedangkan nilai ekspor hasil perikanan lainnya mengalami penurunan sebesar 2,13 jika dibandingkan dengan triwulan I 2019 itu adalah hal yang e dikarenakan cuaca dan juga beberapa situasi dimana beberapa wilayah belum memulai masa panen di triwulan I. Nilai ekspor kontri kontribusi oleh komunitas udang 33,53% dari total dan negara tujuan adalah Amerika Serikat 36,62% atau mencapai 413 juta dollar.
4. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan sampai dengan Mei 2019 terus mengalami peningkatan. Nilai tukar nelayan telah mencapai 11308 dan nilai tukar usaha nelayan bahkan mencapai 127,25%. Kenaikan yang mencapai hampir 20% dibandingkan tahun 2014. Sedangkan nilai tukar pembudidaya ikan juga mengalami kenaikan menjadi e mencapai 101,99 dan nilai tukar usaha pembudidaya ikan mencapai nilai yang sangat tinggi di atas 10% kenaikannya yaitu menjadi 114,94%. Ini juga akibat daripada program-program atas pakan mandiri yang kita lakukan sehingga para pembudidaya tidak bergantung dengan pakan yang di produksi oleh pabrik-pabrik pakan.
5. Sampai dengan Mei 2019 sebanyak 17 peraturan daerah rencana zonasi telah di se selesaikan dan telah terbit PP 32 Tahun 2019 tentang RTRL yang mengatur Rencana Peruntukan Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yuridiksi yang di tetapkan dengan PermenKP tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional untuk Pulau Nipa, Pulau Maratua, Pulau Sambit dan Pulau Senoa.

6. Jumlah kapal ilegal yang ditangkap selama 2019 sebanyak 64 kapal dan telah diproses sedangkan kumulatif sejak 2014 kapal ilegal yang telah ditenggelamkan sebanyak 516 kapal. Selama 2019 penanganan pelanggaran karantina berhasil menggagalkan penyelundupan sumber daya ikan dengan nilai mencapai 329,87 milyar. Kumulatif dari tahun 2014 sampai dengan 2019 yang telah berhasil diselamatkan 1,71 triliun rupiah.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan rapat kerja kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk dapat diraihnya kembali opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan KKP tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya mohon persetujuan lebih lanjut terhadap rancangan RKA K/L Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Seluruh saran, masukan, rekomendasi dari Komisi IV akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Ibu Menteri.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota untuk menyampaikan respon tanggapannya.

Yang nomor satu, Pak Rahmat Handoyo dulu.

F-PDIP (RAHMAT HANDOYO):

Ini kalo kita harus taat kalo Pimpinan ini.

Baik Pimpinan dan Bapak sekalian yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajarannya.

KETUA RAPAT:

Siap-siap nanti Pak Ru.. Pak siapa, Pak Ono Surono.

F-PDIP (RAHMAT HANDOYO):

Masih dalam suasana lebaran saya sampaikan *Minal Aidin Walfaidzin*, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Yang kedua, tentu Ibu Menteri saya sebagai mitra tentu turut senang atas kinerja apa yang disampaikan oleh Standar Akuntansi Negara BTP, pantas kita apresiasi mudah-mudahan ini terus berlanjut. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan anggaran Pimpinan, tentu sebagai alumni perikanan, saya mengapresiasi ya beberapa tahun ini Kementerian melakukan penguatan SDM dibidang perikanan terutama penguatan muatan kampus-kampus Politeknik. Nah saya tidak disitunya, tetapi pada kesempatan yang momen yang berbahagia ini beberapa waktu lalu tepatnya kemarin saya dapat aspirasi dari temen-temen dari alumni khususnya Universitas Diponegoro karena alumni perikanan kebetulan juga saya pengurus alumni untuk disampaikan kepada Ibu Menteri untuk mengingatkan pada waktu beberapa waktu lalu kalau tidak salah, Kementerian Perikanan Kelautan akan mensupport dari sisi SDM Undip dan sisi perikanan. Nah untuk itu barangkali sudah ada e legalnya udah disampaikan kepada beberapa tahun yang lalu lah ini mohon di di sampaikan kepada forum yang terhormat ini untuk mengingatkan kembali agar barangkali untuk tahun kedepan itu bisa menjadi salah satu e program untuk penguatan penelitian dan e pengembangan di sektor Maritim.

Saya kira mengapa saya sampaikan begitu karena memang maju mundurnya suatu bangsa salah satu di mulai dari e penelitian dan pengembangan. Itu Bu Menteri sedikit yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa di respon dari Pak Sekjen maupun teman-teman yang lain dari Kementerian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Mas Rahmat alumni Undip ya? Ohiya pantesan ngomong Undip.

Selanjutnya Mas Ono Surono. Siap-siap Bapak Hasanudin.

F-PDIP (ONO SURONO):

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang saya hormati Pak Ketua,
Pak, Pak Rungkono dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Yang pertama, terkait dengan pagu indikatif 2020 dimana di situ di rencanakan ada 6,4 triliun anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah kalo dari cerita-cerita Ibu dan isu-isu yang berkembang di lapangan tentunya ini kan berawal dengan komitmen Presiden dimana Indonesia harus menjadi poros maritim dunia dan dikaitkan juga dengan isu-isu yang saat ini berkembang yang selalu dinamis. Nah sehingga saat bicara anggaran 2015 yang pagu indikatifnya mencapai 13,8 triliun kenapa sih sekarang malahan kembali ke 10 tahun yang lalu? Kenapa hanya 6,4 kan Bu Menteri juga sering mengatakan bahwa terjadi misalnya penghematan-penghematan saya sih berfikir bahwa penghematan itu bukan berarti juga mengurangi dari aspek anggaran dimana permasalahan yang masih banyak itu ya harus diselesaikan bukan hanya terkait dengan pemberantasan nilai halfisil yang merupakan sebuah komitmen yang mutlak harus kita lakukan tapi bicara pengentasan kemiskinan juga ya tidak akan bisa berjalan program itu manakala tidak di topang dengan anggaran yang sangat besar. Nah sehingga ya, apa yang sebenarnya terjadi apa yang menjadi pemikiran Pak Presiden, apa yang menjadi pemikiran Menteri Keuangan, sehingga pada saat bicara peningkatan PNPB terjadi setiap tahun walaupun misalnya targetnya tidak tercapai harusnya kan ini harus diimbangi dengan anggaran yang mumpuni untuk bisa mengerjakan semua hal yang menyangkut kelautan dan perikanan. Nah jadi mohon informasi Ibu Bapak apakah kita memang harus melakukan apa DPR ini, sehingga yang paling tidak isu-isu di lapangan dari temen-temen juga kan kadang kala pada saat kita ketemu pembudidaya ikan, nelayan-nelayan kecil, tidak ada yang mereka sampaikan selain apa bantuan dari KKP. Nah selama ini kan cenderung Komisi IV juga tidak bisa memberikan memberikan memfasilitasi aspirasi yakan dari masyarakat untuk bisa disalurkan program-program itu, beda dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian pada saat 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari 14 triliun menjadi 31,8 triliun. Walaupun misalnya beberapa tahun belakangan ini juga turun da dari 31 ke 27 ke 24 23 terakhir 21 misalnya. Di 2020 mereka naik lagi, pagu indikatifnya 32,4 triliun. Nah sehingga harusnya KKP inikan memperoleh pagu indikatif yang yang menurut saya bisa dikembalikan kepada 2015 bisa 13 triliun lagi, nah kita bisa leluasa nih anggaran terkait dengan operasi kapal untuk menangkap kapal-kapal asing yang senyatanya sekarang masih banyak beroperasi di laut lepas dan di ZEE Indonesia. Itu kan tidak akan bisa secara maksimal manakala tidak tidak di topang dengan anggaran yang cukup. Nah sehingga mungkin ini menjadi isu yang menurut saya bisa kita kembangkan bersama-sama antara Ibu Menteri dengan Komisi IV paling tidak kalupun di tetapkan di murni segitu paling tidak di perubahan ayolah kita angkat lagi apa yang harus kita kerjakan. Tapi dengan catatan misalnya pada saat dulu kita merencanakan bantuan-bantuan kapal kita pun jugakan bertanya, apakah memang internal dari KKP mampu untuk bisa mengelola ataupun mengadakan terkait dengan kapal-kapal tersebut. Toh kenyataannya pada saat itu juga dari target yang ditetapkan ya tidak semuanya terealisasi malahan pada saat itu ya menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini *disclaimer*. Nah sehingga ya paling tidak menurut saya karena

selama ini saya selalu apa berhubungan dengan nelayan-nelayan daerah pemilihan saya juga pesisir semua nah sehingga ini ya sekali lagi harus menjadi sebuah isu sebuah wacana yang harus kita kembangkan apabila memang sektor kelautan dan perikanan itu ya menjadi penting di negara ini. Nah itu yang pertama.

Yang kedua, bicara hasil ikhtisar pemeriksaan BPK 2015 tadi di sampaikan Ibu Menteri ada beberapa hal, yang pertama terkait dengan pengelolaan kapal bantuan yang belum efektif, yang kedua MoU dengan Kementerian Perhubungan yang belum berjalan sehingga mengakibatkan izin-izin kapal bantuan itu ya sulit untuk di selesaikan dan dari dulu memang kalo kita lihat antara Kementerian Per KKP dengan Kemenhub ini ada tumpang tindih kewenangan dalam memproses izin kapal kita mengenal di Kemenhub ada grosse akta, ada pas besar, ada apa namanya ada beberapa surat-surat yang lain, syahbandar pun ada 2, ada syahbandar perikanan, ada syahbandar umum. Nah baru-baru ini Bu, muncul surat edaran dari Kementerian Perhubungan untuk kapal-kapal yang 30 gross ton ke atas wajib memasang *Automatic Identification System (AIS)* yang menurut saya itu sama dengan (VMS) *Vessel Monitoring System*. Nah apakah memang harus ada 2, 2 alat tersebut di atas kapal yang sebenarnya fungsinya hampir sama. Nah sehingga mungkin ini yang harus juga dilakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Perhubungan ya jangan sampe nih nelayan ini ya kan, ya akhirnya ya mereka repot semua gitu kan dan yang pastinya kan menimbulkan *cost* tambahan pasti alat itu juga harus dibeli. Nah fungsinya seperti apa nah sehingga kan saya pikir ini menjadi hal yang harus dilakukan komunikasi kembali dengan Kementerian Perhubungan.

Nah selanjutnya masih terkait dengan hasil pemeriksaan BPK pada saat KKP diberikan opini *disclaimer* salah satunya itu menyangkut terkait dengan keramba jaring apung yang offshore yang tiga titik yang hampir nilainya 140 milyar kalau tidak salah. Nah saya ingin mendapat penjelasan rekomendasi BPK pada saat itu dimana perusahaan pengadaan offshore tersebut yaitu PT Perinus harus membayar denda dan segala macam apakah itu sudah selesai dibayarkan? Dan informasinya juga dari KKP sudah di putus kontrak dengan PT Perinus dan saya mendapatkan informasi juga bahwa memang BPK pun menyampaikan rekomendasi kepada Perinus untuk membicarakan kembali terhadap denda-denda tersebut. Nah yang mudah-mudahan ini yang tidak menjadi permasalahan hukum apabila ini segera diselesaikan.

Nah selanjutnya terkait dengan isu yang beberapa hari ini muncul di media. Yang pertama terkait dengan isu tuna, ni agaknya di media ini ada beberapa komponen masyarakat membuat opini dilawan lagi opini yang disampaikan oleh KKP dan itu terjadi beberapa hari ini yang membuat bingung karena opini itu sangat sangat bertolak belakang pada saat masyarakat dalam opini tu menyampaikan bahwa Indonesia belum bisa memanfaatkan penangkapan tuna di laut lepas maupun di ZEE dengan banyak berkurangnya kapal-kapal besar yang beroperasi di wilayah tersebut di sanggah misalnya oleh KKP bahwa senyatanya penangkapan tuna itu sudah maksimal dan itu lebih banyak dilakukan oleh kapal-kapal dengan ukuran yang lebih

kecil. Nah sehingga kan ini menjadi hal yang menurut saya harus clear betul sebenarnya apasih yang terjadi di Indonesia ini pada saat misalnya tadi isunya Indonesia belum mampu mengeksplorasi kuota yang ditetapkan oleh organisasi yang mengelola di laut lepas tersebut dan yang kedua terkait dengan ikan asin. Ikan asin kemarin juga rame di semua media sosial muncul terkait dengan ikan asin import. Tapi sayangnya obrolan di twitter saya tidak bisa melihat tanggapannya Ibu Menteri karena saya masih di *block* akun twitter saya. Kapan mau di buka bu? (tertawa) saya tunggu (tertawa) jadi saya hanya bisa melihat *statement-statement* yang lainnya gitu kan. Nah apakah memang ikan asin import ini menjadi isu yang besar disaat misalnya import-import lain juga terjadi. Seperti misalnya ikan kembung yang kemarin juga sempet rame, sempet rame dan mengakibatkan turunnya ikan kembung, ikan layang yang ditangkap oleh kapal-kapal kursin lokal kita, sampai harga Rp 12.000,- kemarin saya sudah menyampaikan dalam rapat dengar pendapat sebelum hari raya saya menyampaikan bahwa di saat harga pangan yang lain cenderung naik menghadapi apa e hari raya, tapi ikan ini turun. Apakah memang import ikan yang izinnya kalo tidak salah masih diberikan oleh KKP ini *over*, *over* kuota dan rembes di pasar misalnya atau seperti apa padahal ikan kembung lokal itu ya sempet mencapai Rp 20.000,- harganya tapi kemarin Rp 12.000,- informasinya sulit juga untuk menjual. Nah sehingga terhadap isu-isu itu mohon juga ini menjadi perhatian dan mohon tanggapan dari Ibu Menteri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kami persilakan Pak Hasanuddin.

Siap-siap Pak Andi Akmal.

F-PPP (HASANUDIN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua yang saya hormati, seluruh anggota Komisi IV yang berbahagia, Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang kami muliakan.

Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir Dan Batin.

Pertama atas nama pribadi dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sumbar I berterima kasih pada jajaran e Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah memberikan beberapa bantuan. Pertama bioflok sudah 5 pesantren sudah kami

terima tinggal pelaksanaan saja sudah dikeluarkan SKnya untuk 5 pesantren, terima kasih Bu.

Yang kedua, pelatihan dari ESDM dari SDM Kelautan 300 peserta di 3 lokasi, Danau Singkarak, Danau di atas dan di bawah, dan di satu lagi di Lembah Gumanti. Jadi sudah ada pelatihan 300 peserta kelompok perikanan budidaya, itu yang pertama.

Yang kedua, yang belum terealisasi adalah peremajaan rumput laut di Pesisir Selatan. Yang kedua, Dermaga Apung. Yang ketiga, alat pendingin untuk perikanan di Pesisir Selatan itu yang belum terealisasi.

Ibu Menteri yang berbahagia,

Ada beberapa pertanyaan dari kami. Pertama, mohon dijelaskan capaian terhadap penangkapan *illegal fishing* sebagai bentuk pengawasan dari KKP terhadap beberapa kasus yang terjadi selama ini apakah sesuai harapan dengan anggaran yang telah di alokasikan tahun 2018 2019.

Yang kedua, mohon dijelaskan pendapat KKP terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perizinan dan denda yang dilakukan terhadap pelaku usaha Perikanan periode semester I 2019.

Lanjut, denda terhadap kerugian dan kerusakan ekosistem laut dan termasuk juga sengketa perusahaan.

Tiga, mohon dijelaskan kepada kami perkembangan terhadap proses Rekrutmen Hakim (suara tidak jelas) peradilan perikanan yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung, bagaimana pengalokasian penganggaran, dalam Anggaran KKP 2019 dalam rencana Tahun 2020 tentang (suara tidak jelas) Perikanan.

Empat, mohon dijelaskan proses penyelesaian terhadap temuan KPK sementara posisi KKP tahun ini wajar tanpa pengecualian, apakah ini ada temuan dari KPK.

Lima, terakhir, mohon dijelaskan perkembangan kasus penyelundupan 205.000 per benih Lobster di Tumbang perkembangan budi daya Ikan Zebra di Tumbang, projek penataan kawasan wisata di pesisir selatan di Mandeh, dan *project plan* pengembangan Perikanan tangkap dan Budidaya di Sumbang terhadap pelaksanaan Anggaran di Semester 1 2019 dan Rencana Tahun Anggaran 2020.

Itu beberapa pertanyaan yang telah disampaikan dari Sumbang 1 dari Fraksi Partai (suara tidak jelas) Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Apresiasi terhadap Ekspor yang dilakukan oleh Kementrian Perikanan dan Kelautan pada Tahun 2018/2019.

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakaatuh.

F-PKS (ANDI AKMAL PASLUDIN):

Makasih Pak Hasanuddi, Pak Andi, Pak Hermanto (suara tidak jelas).

F-PKS (HERMANTO):

Makasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Ibu Menteri, beserta jajaran Eselon I yang berbahagia

Pertama, saya juga pribadi Mohon Maaf atas segala kesalahan, Mohon Maaf Lahir Batin, mudah-mudahan di Tahun 2020 ini jadi yang lebih baik, *insyallah*.

Yang kedua, sebagai pribadi juga Anggota Komisi IV Bu Menteri, memberikan Apresiasi terhadap WTP, kita berharap setelah *Desklaimer* langsung WTP ini luar biasa sebenarnya, harapan kita mudah-mudahan semua yang kemarin bermasalah itu bisa di selesaikan ya, Bu Menteri, dan betul-betul apa namanya bisa membangun Perikanan kita yang lebih transparan.

Kemudian yang kedua, kalau melihat Anggaran dari Kementrian KKP dimanakan 2019 ini dari Pagu Indikatif mengalami penambahan ya, walaupun penambahannya tidak begitu besar kurang lebih 1 triliun saya tadi bersama dengan apa namanya pak ono bahwa istilahnya berharap bahwa tambahannya ini bisa sampai 10 triliun harapan kami.

Karena kita sudah bersepakat bahwa Kelautan dan Perikanan merupakan sektor yang sangat strategis. Harapan kita bukan hanya pernyataan politis tapi Pemerintah juga memberikan apa namanya dukungan Anggaran, dan disini saya juga tidak melihat Bu Menteri memberikan usulan tambahan.

Apakah sudah dianggap ini, kalau menurut kami tidak cukup sebenarnya, karena ya, Pak udah tadi mengatakan masih butuh biaya untuk pengawasan, butuh bantuan Budi daya dan lain-lain, tapi mungkin ada pertimbangan dari Bu Menteri sehingga ini hanya 6.4 triliun.

Karena semua Kemetrian yang ada Bu, semua mengusulkan tambahan, ya kan, mungkin karena Bu Menteri tahu bahwa uang kita tidak ada sehingga tidak perlu ada usulan tambahan toh nanti juga tidak ada tambahannya, jadi saya kira ini bercanda saja, tapi kita berharap bahwa Bu Menteri kedepannya saya ada harapan bahwa setelah 4 tahun kita bersama-sama di Komisi IV ini, perhatian Bu Menteri terhadap sektor Perikanan tangkap.

Kemudian juga terhadap pengusaha-pengusaha Perikanan ini sudah cukup bagus ya, dan saya dukung Bu bahwa ini memang perlu adanya transparansi, kita tidak ingin bahwa nanti Indonesia ini terutama Pemilik Kapal ini *Monopoly*, atau bahkan *Oligopoly* gitu, benar yang dilakukan Ibu Susi ini bahwa bagaimana memastikan bahwa harus ada keadilan bagi seluruh Rakyat kita yang ingin memiliki Kapal. Ya Bu ya, saya sangat dukung.

Karena kalau tidak bisa jadi nanti yang di Kapal-kapal Indonesia ini pemiliknya hanya 5 orang, 10 orang, seperti di Sektor Kehutanan selama ini kan ada HPH 1 juta Hektar di kuasai, ada 2 juta Hektar, sementara orang-orang kecil tidak dapat ruang untuk mendapatkan, saya sangat dukung Ibu Menteri, dan catatannya adalah Transparansi bu, kalau Ibu memang betul-betul tegas terhadap Transparansi kita dukung, berlaku untuk *Markdown* dan *Markup* itu perlu kita tindaklanjuti Bu, ya Bu ya.

Jadi kami di Komisi IV ini sepakat bahwa hal yang baik tentu kita dukung, dan tentu selama 4 tahun ini Bu Menteri ya, kita tidak ada sebenarnya urusan pribadi-pribadi dengan KKP, bisa di cek lah dengan apa namanya, dengan Dirjen nya, Cuma memang untuk ini Bu Menteri, saya sepakat dengan pak Sudin bahwa Perizinan ini perlu mungkin perbaiki sistemnya, dan juga kepastiannya berapa lama kepastiannya itu.

Sehingga semua orang ini bisa mengecek bisa saja memang barang ini tidak sampai di Kementrian, tapi oleh calo-calo ini memang yang bergentayangan, karena saya juga di Fraksi PKS Bu, menerima banyak aduan dari beberapa daerah yang saya ratakan ternyata calo-calo yang banyak masuk, ya oleh karena itu sistemnya diperbaiki dan pengawasannya Bu, untuk di Sulawesi ini Bu Menteri kan cuma satu ya kita punya PSTKP ya, apa namanya, Pangkalan ya, kita berharap juga, di Sulawesi Selatan ini ada Pangkalan juga Bu, yang memastikan bahwa para pelaku *Illegal Fishing, Illegal*, apa namanya yang lain itu bisa di tindak lanjuti begitu, karena Sulsel ini kan, Sulawesi sangat luas daerahnya, kalau hanya di Bitung ini, sangat susah untuk meng-cover daerah sampai di Sulsel, Utara ke Selatan, dan bukan hanya Penguasaanya tetapi apa namanya membina, ya Bu ya membela para apa namanya pelau-pelau usaha Perikanan ini.

Dan terakhir bu Menteri saya berharap kedepan sebenarnya adalah bagaimana kita punya perhatian khusus terhadap Nelayan kecil, Nelayan tradisional, nah ini harapan kita Bu Menteri sebenarnya adalah dengan mengalokasikan Anggaran bantuan kepada mereka, begitu, karena selama 4 Tahun ini kalau kita melihat, persyaratan bantuan itu sangat susah bagi Nelayan Tradisional dan Nelayan Kecil sebenarnya bu, mungkin perlu dicarikan jalan atau solusi kan, mereka langsung penerima-penerima bantuan seperti di Komisi VII, ada bantuan Mesin *converter* untuk Nelayan kecil, ya jadi dari mesin apa namanya, BBM ke Gas itu sangat terasa Bu, apa namanya manfaatnya bagi Nelayan Kecil.

Itu banyak sekali di Komisi VII di apa namanya, Kementerian Migas memberikan bantuan, dan orang per orang, Nelayannya gitu, saya kira seperti ini Bu Menteri perlu diperhatikan kedepannya sehingga yang mendapatkan Bantuan itu orang kecil Bu, bukan lagi pengusaha-pengusaha gitu, tapi memang Nelayan Nelayan Tradisional, Nelayan kecil, yang memang mendapatkan perhatian dari Negara sehingga mereka bisa menjadi Sejahtera, begitu, ya jadi saya kira seperti itu harapannya Bu Menteri, karena *insyaallah* kita apa namanya, selama kurang lebih 4 tahun bersama-sama, dan tentu yang berhasil dilanjutkan, yang belum mungkin bisa, dicarikan jalannya sehingga para pelaku usaha Nelayan ini semua mendapatkan perhatian, begitu, mungkin demikian Pak Ketua, Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih Pak Andi.

Pak Hermanrto, kami persilahkan.

WAKIL KETUA (Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirohmaanirrohiem,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Ada Bu Menteri beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Pertama, saya menyampaikan *Minal Aidzin Walfaidzin, Taqabbalallahu Minna Waminkum Allahuma Ya Karim*, karena ini masih bulan Syawal dan hari baik buat kita semua.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan Apresiasi atas Kementerian KKP mendapatkan WJP, Ini suatu hal yang menakjubkan dan kita, memang kita tunggu-tunggu yang selama ini Komisi IV dorong dan dukung sepenuhnya untuk supaya meraih WJP ini, ini adalah hasil kerja keras dari Kementerian, dari Dirjen beserta jajarannya.

Kemudian yang perlu kami sampaikan disini adalah karena Anggaran Periode kita ini adalah Periode Transisi, dari stau periode pemerintahan yang sekarang dengan Pemerintahan yang akan datang, tentunya kami melihat suatu hal yang sangat Urgent dan Penting bagaimana Anggaran ini bisa bersifat, *continuous*, berkelanjutan, tapi pada dasarnya kami ingin memberikan masukan secara strategis

pada saat sekarang ini Kementrian haruslah memberikan satu gambaran yang Komperhensif tentang perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan, supaya kita mendapatkan Gambaran seperti apa yang akan kita kerjakan pada 5 tahun yang akan datang.

Jadi kita berharap ada 1 Peletakkan Dasar tentang rencana- rencana strategis agar Anggaran yang kita susun nanti ini bisa dikelola secara efektif dan efisien dan tepat guna.

Nah ini persoalan yang sangat mendasar di masa transisi, saya minta sekali nanti pada saat pertemuan berikutnya ada satu gambaran yang sangat komperhensif yang mencakup data yang akurat kemudian sumber daya yang tersedia, termasuk juga sumber-sumber Anggaran, ya, yang pasti untuk membangun Kelautan dan Perikanan kedepan, nah ini sangat pening buat kita, karena inilah yang nantinya akan menjadi ukuran evaluasi kita, selama ini kan kita sering sekali bersifat Pisial, menyusun kegiatan Anggaran dan Kegiatan, sehingga rangkaian-rangkaian Kegiatan itu menjadi satu hal yang terpisah tidak menjadi suatu rangkaian yang bersifat komprehensif yang bisa kita mendapatkan gambaran secara utuh.

Ini menurut saya sangat penting ya, supaya kita mempunyai instrument untuk melakukan evaluasi, melakukan pengawasan, dan lain sebagainya, selain dari itu saya juga ingin menyampaikan, kenaikan anggaran, di tahun 2020 hanya kurang lebih 1 Trilyun, ya tentunya ada satu pertanyaan buat kita, Pak Ketua, untuk apa kenaikan 1 Trilyun ini, nah saya ingin memberikan 1 Orientasi saja, bahwa selama ini Anggaran kita itu lebih berpihak kepada kepentingan-kepentingan para elit ya, tidak cenderung kepada pembangunan sektor perikanan yang berbasis kepada masyarakat, atau Nelayan kecil.

Oleh karena itu di dalam pembangunan didalam perencanaan Komperhensif nanti kami minta supaya, Piramida Anggaran itu harus jelas keberpihakan nya, yaitu kami minta supaya, Anggaran ini lebih kepada memnuhi kebutuhan dari Nelayan, dan para pihak yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan, nah itu adalah sebenarnya dalam sistem negara, relasi antara DPR dengan Kementrian itu kan sudah dibangun sedemikian rupa.

Bahwa Anggaran itu adalah bersifat *Up Down* sebetulnya, artinya ada usulan-usulan dari, dari bawah yang harus di Apresiasi dan harus menjadi satu kebutuhan daripada, Anggaran itu sendiri dan kebutuhan dari para Nelayan, dan para pembudidaya, karena selama banyak sekali usulan-usulan dari pembudidaya, dari Nelayan, itu yang sebenarnya usulannya itu sangat *real* untuk kebutuhan dia misalnya, misalkan contohnya dalam hal mengaloksaikan bantuan kapal ini juga kita harus memperhatikan kearifan dari daerah tersebut, sebab tidak semua model kapal itu, itu yang cocok semua daerah, sementara kita merencanakan, membuat Kapal itu grosiran, maksud saya itu sama, ya, tidak menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat Nelayan setempat.

Saya pernah ke Mentawai Bu Menteri, nah itu ada keluhan dari Nelayan, kita pernah bantu juga kesana bersama juga waktu itu dengan Pak Tio sebagai Dirjen waktu itu, saya Terima kasih Pak Dirjen yang telah mengunjungi sangat serius, sama ada salam dari para Nelayan, termasuk juga Bu Menteri, yang telah berkenan memberikan Bantuan Kapal, termasuk juga waktu itu dari para Badan Usaha dari Kementerian, nah ini yang dikeluhkan oleh Nelayan, itu kan bentuk Kapal nya, itu kan disitu, di dilaporkan bahwa sistem pendingin Kapal itu ya, itu sangat dekat dengan Mesin, sehingga Proses pendinginan di Kapal itu tidak terjadi secara sempurna, nah ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, ya ini, ini kebutuhan dari Masyarakat.

Kemudian juga dibentuk Kapal nya itu sendiri, itu tidak pas dengan Kearifan Lokal disana, sehingga mereka menghendaki walaupun misalnya itu dikerjakan oleh pihak ketiga itu supaya, apa yang menjadi usulan mereka itu tentang bentuk Kapal itu, itulah yang dipenuhi, walaupun itu nanti pengerjaannya kepada pihak ketiga, mereka *nggak* ada masalah, cuman kearifan lokal nya itu yang perlu diperhatikan, karena kalau kita baca juga kan setiap daerah itu punya ciri khas Kapal yang berbeda, bentuk-bentuk Kapal yang berbeda, karena memang mereka sudah berpengalaman di Laut itu, untuk kapal yang baru yang datang, dan pada akhirnya Kapal itu pun juga tidak efektif digunakan.

Jadi inilah yang saya maksud supaya unsur-unsur seperti ini masuk dalam sistem perencanaan kita supaya, Anggaran yang kita gunakan ini betul-betul di guna dan bermanfaat untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan, kemudian juga ini Aspirasi ya Bu Menteri ya, itu di Mentawai itu ada pabrik Es ya, ada juga pengisi BBM inia apa namanya nih, SPBUN ya, itu mereka, sampai sekarang, SPBUN itu tidak berjalan sebagaimana mustinya, ya, atau *nggak* salah sudah saya laporkan ya, nah ini, ini adalah juga Aspirasi dari Nelayan supaya mereka itu pun juga nanti ketika mengisi BBM tidak terlalu jauh kemana-mana, gitu karena disitu adalah Mentawai itu adalah tempat pusat Nelayan, dan Bu Menteri pernah kesana kan, nah kalau Bu Menteri kesana tolong ajak saya Bu Menteri dan kita berenang bersama Bu, (tertawa).

Pak Ketua maaf Pak Ketua, mendahului Pak Ketua, nah jadi ini yang menurut saya yang menjadi perhatian kita termasuk juga untuk supaya efektifnya pembangunan ini, kita berharap juga sistem perizinan itu juga harus di sederhanakan, ya sebab ini juga banyak keluhan dari para nelayan dan juga para pembudidaya, maksud saya Nelayan ya, karena Nelayan yang banyak izinnya, termasuk juga proses, e sekarang gini apakah kita masih digit atau tidak, terkait dengan pembentukan Badan Usaha untuk para pembudidaya, bahkan selama ini sejak ada izin ini kan kita untuk mendapatkan Budidaya itu harus ada Badan Usaha, ya.

Nah ini pun juga menurut saya, kita perlu ada suatu aturan, tapi jangan sampai menyulitkan, itu saja ya, karena ini adalah kepentingan rakyat, kepentingan

masyarakat kita, ya karena sebagaimana yang kita sebutkan dan sering kita baca di Rapat-rapat ini bahwa Orientasi ikan kita itu bukan lagi di Laut, tapi di Darat.

Nah ini adalah kita harus memberikan suatu Manajemen yang baik terhadap bagaimana pembudidaya, mengelola ikan itu, supaya mereka pun juga bisa mengelolanya secara baik, nah kemudian juga terkait dengan kami juga berterima kasih kepada Kementerian dan Bu Menteri ini juga sudah ada program untuk memudahkan para Pembudidaya untuk membuat pakan, ya tapi mereka ingin lebih meminta untuk supaya ada satu mesin yang bisa secara mandiri mereka membuat pakan sendiri.

Nah ini pun juga nanti apa ini mohon juga nanti di Agendakan supaya juga nanti para pembudidaya ikan ini pun juga bisa mengolah pakannya sendiri, nah kemudian Bu Menteri karena tadi saya menyebutkan ada perencanaan komprehensif terkait juga adanya data adanya Sumber Daya, adanya juga Anggaran dan segala macamnya, dari Aspek sumber daya, Sumber Daya Manusia yang saya maksud.

Saya juga minta ini ada satu penataan yang lebih Manajemen untuk membangun Kelautan Dan Perikanan kita, oleh karena itu saya minta juga nanti ini, ini juga Aspirasi, Penyuluh Perikanan Bantul yang selama ini telah bekerja, yang telah berbakti pada sektor Kelautan Pak Syarif ya, itu juga harus kita Apresiasi statusnya, jangan sampai mereka ini dibiarkan, ya dan ini adalah Sektor yang sangat mendukung keberhasilan Pembangunan Kelautan Perikanan. Oleh karena itu, Bu Menteri untuk 2019 ini kami minta juga supaya nasib status dari Penyuluh Perikanan Bantu ini pun juga mohon di perbaiki ya, karena saya pikir juga, KKP juga membutuhkan Sumber Daya Manusia, saya pikir supaya ini adalah sudah tersedia dan sudah ada, tinggal meningkatkan statusnya saja, tinggal memperbaiki sistem Administrasinya, supaya persoalan ini supaya tidak ada sisa persoalan kita di masa yang akan datang, jadi soal kita yang sekarang ini, kita selesaikan hari ini, dan nanti Kementrian yang akan datang itu menerima satu keadaan yang lebih *Sip* dan bisa membangun KKP yang lebih baik, dan lebih Manajebel, nah ini saja Pak Ketua yang perlu saya sampaikan, terkait satu lagi, ada 516 Kapal yang ditenggelamkan, nah ini persoalan kita juga ya karena Kapal ini kan juga nanti jadi bangkai, lalu untuk apa, ini kan bisa nggak ini kita olah menjadi satu lahan untuk apakah terumbu karang atau apa, nah ini bisa nggak itu di Upgrade menjadi suatu agenda dari KKP.

Kemudian satu lagi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini pun juga di Pelabuhan Muahara, Kota Padang, itu ada kerangka, kerangka Kapal yang sudah tua dan juga sudah tidak terpakai, bukan tenggelam, nah itu juga supaya ini juga secara keseluruhan dari tempat-tempat yang lain juga, saya minta ini agar ada satu Kawasan supaya tidak ada bangkai Kapal di setiap muara-muara itu dan ini juga harus kita dorong supaya, Pantai kita ini, Muara kita ini, yang menjadi Ranah KKP, itupun menjadi satu Ranah lingkungan yang bersih dan ramah, jangan sampai Air itu betul-betul sampah semua isinya, dan nyangkut di kerangka Kapal itu.

Demikian Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Oh iya kita *skors* dulu ya, Ibu Menteri mau melaksanakan tugas yang tidak dapat diwakili.

Silakan Bu.

(RAPAT DISKORS)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ini adalah *skors* yang terlama, dalam Rapat dengan Mitra Kerja, karena saya dapat memahami, ini mengingat banyak usulan yang disampaikan oleh Pak Hermanto, tadi sehingga memang membuat Ibu agak kelabakan, sebenarnya, dan paling membuat Ibu Kelabakan itu karena usulan yang terakhir tadi, Bu, untuk nanti berenang bersama, itu di Mentawai, ya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Harus ada Asuransi loh Pak, (tertawa) harus ada Asuransinya.

KETUA RAPAT:

Iya saya setuju Bu, Apalagi di Mentawai, karena itu Area Gempa, ya kan kalau memang Gempa yang menimbulkan akibat Alam itu tidak apa-apa, tapi saat berenang dengan ibu, Gempa itu ditimbulkan oleh Pak Hermanto sendiri itu yang menjadi masalah sebenarnya, itulah yang membuat Ibu tidak tahan sehingga harus berlama-lama dan saya dapat memahami itu ibu, dapat memahami, oke kita lanjut, dengan Pak Erislan, ada Pak Erislan? Ibu Agustina kami persilahkan.

AGUSTINA WILUJENG:

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Ibu Menteri yang saya banggakan

Berdasarkan hasil pembicaraan di ruang sebelah tadi bahwa harus cepat dan ringkas, saya sampaikan, (tertawa), beberapa Kali Kunjungan Ibu ke Jawa Tengah, terutama di Sekitaran Pantai Kartini Jepara, bersama teman-teman dari Universitas Diponegoro, pernah ada pembicaraan untuk Kementerian dapat memfasilitasi pendirian Laboratorium, pengembangan wilayah pesisir pantai.

Nah kemarin sebagai Ketua Umum kegiatan Alumni, kami bertemu dengan Pak Rektor dan (suara tidak jelas) untuk menanyakan apakah kira-kira LPWP, kalau tidak salah Gedungnya, namanya ya, itu bisa direalisasikan, kalau tidak bisa tahun ini mungkin tahun depan atau direncanakan, di pesisir Pantai Kartini, Jepara, Jepara bukan Dapil saya Bu, ini semata-mata adalah Amanah, dari teman-teman Universitas Diponegoro yang memang pada saat ini Kondisinya sangat memprihatinkan.

Laboratorium itu sangat dibutuhkan baik oleh para Mahasiswa, Fakultas Ilmu Perikanan maupun Kelautan, maupun oleh Masyarakat di sekitar Pantai Kartini, demikian ini amanat dari Universitas Diponegoro sudah saya sampaikan, mudah-mudahan Realisasinya bisa cepat dan mudah-mudahan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Nelayan pada umumnya.

Terima kasih,
Waktu saya kembalikan Pak Ketua.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Agustina.
Pak Erislan, terakhir Pak Made.

Oh sebentar Ibu, ini perlu diabadikan, coba difoto dulu, teman-teman Sekretariat, Pak Toro, sebentar Bu difoto dulu Bu, difoto sebentar Bu sebentar.

Terima kasih Ibu Agustina.
Pak Erislan silahkan, dan terakhir Pak Made Urip.

F-NASDEM (ERISLAN):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Buat Kita Semua.

**Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Kelautan dan Perikanan Bu Susi,
Kemudian yang saya hormati juga saya cintai Pimpinan Komisi IV DPR RI beserta Anggota DPR RI.**

Saya mengucapkan, izinkan saya mengucapkan Minal Aidzin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir batin, ini masih dalam bulan Syawal.

Saya coba menyampaikan pandangan-pandangan terkait Rapat kerja ini, karena ini merupakan Rapat kerja membahas Program Kerja untuk nanti 2020, kemudian rencana Anggarannya juga di 2020, maka saya ingin membahas sesuai konteks itu yang ada di sampaikan kepada saya.

Nah dari sekilas, bahan ini juga kurang inovatif ya, kayaknya di *copy paste*, kayaknya setiap saya rapat, bahannya formatnya seperti ini saja, kemudian itu satu, yang kedua bahwa tema induk penggunaan Anggaran 2020 ini adalah daya saing, sering disampaikan, itu disampaikan oleh pak Menteri, ya perencanaan Nasional dan Bappenas, dan Ibu Menteri Keuangan, Daya saing, dimana daya saing itu ada indikator yang pertama adalah tata kelola dan Birokrasi yang berkualitas, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemudian koneksi ke infrastruktur, kemudian penguatan-penguatan dana-dana Daerah, nah ini menjadi topik atau *Grand strategy* didalam pengelolaan Anggaran yang nanti nya menjadi Program Kerja Pemerintah untuk tahun 2020.

Nah dari sini ya tentunya, karena ini sebuah negara menjadi sistem suatu kesatuan, yang harus merujuk kepada *Grand Strategy* indo, maka di harapkan semua Kementrian juga merujuk kepada itu, nah dari Program kerja maupun rencana Anggaran ini yang disampaikan ini, itu saya lihat, mungkin belum menggambarkan ke arah situ, terutama kalau bicara sumber daya manusia, kita lihat disini masih kecil tata kelola, Pak Jokowi sering sampaikan, sering sampaikan sekali, karena Pak Jokowi kan juga menumbuhkan orang yang selalu Birokratif ya, beliau Pengusaha, jadi beliau sampaikan bahwa, jangan kita ber orientasi kepada pro struktural, berorientasilah kepada hasil, karena apa, ada imbas-imbasnya. Contoh, Defisit Ekonomi itu disampaikan Pak Jokowi, itu dikarenakan kurangnya Ekspor, Ekspor Negara yang kurang, jadi dampaknya disitu, Ekspor ini pasti lah, kaitannya dengan Birokrasi yang selalu berbelit-belit. Kemarin juga saya sampaikan contoh kecil, ya ini secara apa garis besarnya dulu, besarnya dulu, latar belakang pemikirannya dulu, belum masuk kedalam apa pembahasan yang lebih detail.

Nah contoh ya, saya punya usaha mau bikin edisi,(suara tidak jelas) saya mendaftarkan itu ke 2 Bank Swasta dan BUMN, Bank Swasta BCA itu lebih cepat, BRI, BNI itu lama. Masalahnya apa? Bedanya apa? Sama-sama bank ya, ini masalahnya kenapa ini lebih cepat ini lebih lambat.

Nah itu kembali kepada masalah birokrasi. Itu yang dimaksud tadi kata Pak Joki Pak Jokowi, jangan kita berorientasi terlalu prosedural walaupun memang kita juga tidak boleh meniadakan yang namanya prosedural karena ini terkait dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Tapi juga jangan terlalu ... Nah dari itu bahwa kita bicara birokrasi ini contoh di Setjen, Setjen KKP ini anggarannya cuma 523 miliar dari pagu indi indikatif yang ada disini. Ini tidak menggambarkan bahwa Setjen itu mencoba membangun sebuah birokratis yang berkualitas, tata kelolanya berkualitas, tidak menggambarkan. Karena semua birokrasi dan tata kelola yang berkualitas itu merujuk kepada sebuah efisiensi dan efektivitas. Itu merujuk kepada efisiensi dan efektivitas. Ya ketika pengurusan sesuatu itu ya harus melalui misalnya penyuluhan, kemudian lari lagi ke dinas kabupaten, Dinas Provinsi, baru ke Pusat yang itu hanya me me apa membutuhkan cap-cap tanda tangan kenapa tidak menggunakan sistem saja tinggal input. Verifikasi menyusul di lapangan, itu bisa disiasati. Artinya ini yang dimaksud dengan tata kelola. In sebuah negara, ini sebuah lembaga, perlu manajemen, perlu tata kelola. Di level menteri itu sudah bicara tata kelola. Kita tidak lagi bicara tentang teknis-teknis. Nah kemudian ada tumpang tindih, nah ini yang harus dibenahi. Ya, kemudian gitu ya, di Sekjen itu jelas, untuk melihat bagaimana ya program kerja sebuah Kementerian untuk memperbaiki tata kelola yang dibidang selama ini *good governance* itu dilihat dari anggaran, inputnya disitu gitu. Kalau dia hanya 523 itu menurut saya belum menggambarkan. Itu karena ini Kementerian memegang se-Indonesia. Kemudian SDM juga, SDM disini hanya 1,8 triliun. Makanya kemaren saya sampaikan bahwa kita minta, ya kita minta rencana itu yang tersistem. Jadi input ini anggaran ini untuk apa ya, kemudian sasarannya siapa, capaiannya yang diharapkan seperti apa sehingga hasilnya begini yang diharapkan dan *outcome*-nya adalah ini. Kalau begini kan kita tidak tahu nanti 1,8 triliun ini untuk SDM seperti apa penggunaannya. Padahal jelas sekarang programnya Pak Jokowi bahwa sekarang itu menggembar-gemborkan penguatan SDM. Harusnya disini porsinya lebih besar. Ini saya bicara secara umum saja. Nah ini yang bisa terkait dengan sebuah kelembagaan, nah terkait dengan teknisnya ya, saya melihat bahwa larinya kelembagaan tadi akan mempengaruhi teknis. Contoh mina padi, program mina padi. Mina padi ini karena birokratisnya lambat, mungkin turun baru sebulan lagi. Ketika turun, padi itu udah pada besar Pak, airya sudah ngga ada. Mau mau narok ikannya itu dimana, mina padi itu kan konsepnya narok ikan disebelah tanaman padi. Kalau padinya sudah kering, mau narok ikan dimana? Karena birokrasi yang lambat ini, itu. Akhirnya bukan mina padi, sebelah padi. Nanti mereka buat kolam di sebelah sawah itu baru ikan itu ditarok disitu, bukan lagi mina padi sawah padi. Ini konteks dalam rangka bagaimana birokrasi ini bisa berimplikasi kepada hal-hal yang teknis ya itu menjadi ini.

Ya kemudian juga saya lihat disini ya, saya lihat disini anggarannya lebih okelah, ini penguatan dari saya lihat banyak kepada alokasi ke 216,75 juta ekor benih dan calon calon induk ikan dan udang. Nah ini kan harus jelas, penyebarannya itu di titik koordinat mana saja. Jangan sampai penyebaran ini nanti menguntungkan

pengusaha-pengusaha tertentu. Karena nelayan bagi saya itu adalah nelayan bagi saya itu adalah nelayan-nelayan yang ada di perkampungan-perkampungan bukan pengusaha-pengusaha gitu lho. Jadi kalau dia penyebarannya di lingkungan apa tambak atau garapan pengusaha ya nanti dia ketika besar ya menguntungkan pengusaha, bukan nelayan yang diuntungkan, gitu ya. Jadi nelayan abgi saya itu adalah nelayan yang ada di perkampungan-perkampungan nelayan yang di pinggir-pinggir pantai. Itu masyarakat kita itu masyarakat miskin yang harus ditingkatkan kesejahterannya melalui tangkapan-tangkapan yang banyak.

Selanjutnya ini cara tentang tangkap kapal dari sini kita lihat bahwa 150 hari untuk operasional operasional pesawat patroli. Ini kan operasionalnya ini untuk menagawasi apa kapal *illegal fishing* ini kan terbang dari 1 pangkalan ke pangkalan yang lain, mungkin begitu ya terbang dari 1 pangkalan ke 1 pangkalan yang lain. Kita lihat 150 hari ya, 1 tahun itu ada berapa hari, 1 tahun itu ada 365 hari. Jadi yang sisanya ini kalau kapal apa helikopternya ini ya, pesawatnya ini ngga terbang artinya tidak ada yang mengawasi itu. Bisa saja terlepas nanti dari apa pat ee pengawasan KKP ketika pesawat itu tidak terbang. Kan ini kan 1 tahun ada 360 hari 365 hari, kalau 150 hari sisanya kemana. Masa ... Begitu juga dengan kapalnya, in ikan hanya 150 hari. Nah begitu cermin anggaran itu. Nah ketika tidak ada kapal laut ataupun kapal udara yang berpatroli maka kemungkinan mereka bisa masuk. Ini kan penjahat ini juga lic pinter gitu, ketika pat pesawat patroli tidak ada mereka apa mereka masuk gitu, mencuri. Nah ini semua harus terukur, gitu. Ya kita tidak bisa berbicara tentang asumsi, 1 minggu berapa anggarannya untuk 1 kapal itu. Kemudian efektivitasnya berapa kapal yang bisa ditangkap selama 1 tahun ini berapa. Harus terukur, semuanya bisa diukur. Sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan salah-olah rutinitas gitu. Jadi dengan ukuran itu kita bisa melakukan peningkatan-peningkatan terus, memaksimal pemaksimalan terus. Nah ini 1, yang kemudian bahwa bahwa seharusnya ya, ketika kita menggunakan konvensional begini akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah wah SDM kami kurang ya, dna kami kurang. Coba kalau kita menggunakan sistem ya. Misalnya contoh pesawat ee kapal kapal kapal tangkap Indonesia itu dikasih kode atau *barcode* sehingga ada identitas penanda. Jad ketika ada kapal asing ya kapal asing yang masuk ke Indonesia itu bisa terdeteksi, tidak perlu melalui patroli-patroli lagi gitu. Nanti ketika terdeteksi tinggal tau titik koordinatnya maka nanti tinggal disampaikan kepada kapal yang terdekat untuk dilakukan penangkapan. Ini teknologi itu semua memungkinkan, teknologi tidak ada yang tidak memungkinkan ya. Kita menggunakan google map itu saja, google maps tau jalan ke depan nanti 300 meter ke depan ada belokan ke kanan. Ini kan artinya google maps sudah melakukan itu, apalagi dengan kasus-kasus yang terkait dengan GPS atau radar itu. jadi itulah, saya menekankan bagaimana ya sistem ini, birokrasi ini, tata kelola ini diperbaiki yang muaranya kepada efisiensi, efektivitas dan transparansi akuntabel itu, seperti itu. Sehingga terjadilah tata kelola yang sehat, kemudian apa tidak ada alasan kekurangan SDM didalam menangani sebuah birokrasi begitu. Tapi ketika itu secara manual nanti kita urusan ijin misalnya urusan apa lembaga KKP

dibilang karena saya kurang SDM. Karena terlalu banyak pintu urusan harus ke bagian ini, bagian ini, bagian ini. Yang jadi masalah, yang jadi alasan klasik nanti adalah kekurangan SDM. Tetapi ketika menggunakan sistem online maka itu tidak akan terjadi itu langsung ya tidak melalui banyak pintu. Itu yang menjadi bagian dari apa yang menjadi *grand strategy* untuk 2020 tentang tata kelola yang berkualitas. Karena ini kelembagaan, mau ngga mau kita bicara kelembagaan. Kelembagaan itu sangat kompleks, bicara tentang birokrasi, tata kelola, manajemen, sistem begitu. Nah kemudian disampaikan juga bahwa ya co banyak keluhan memang ya Buk terkait dengan ijin tangkap kapal. Nah ijin tangkap kapal ini gini, di Undang-Undang katanya 14 hari 14 hari tapi kenyataannya ternyata ada yang sudah berbulan-bulan belum juga keluar ijin kapalnya. Nah mungkin ngga terjadi potensi nantinya ketika terlalu lama ada potensi terjadi penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Karena semakin ada masalah, maka disitu semakin banyak akan terjadi penyimpangan. Boleh Ibu enetapkan sebuah aturan yang stretching, yang baik, yang tegas untuk menjaga kedaulatan apa namanya. Tetapi tetap dicarikan solusinya gitu. tidak ketika diterapkan aturan begini kemudian kalau tidak sesuai ya sudah dibiarkan saja tanpa ada solusi-solusi. Karena semua yang berurusan dengan KP ini adalah masyarakat Indonesia juga, 1. Yang kedua, KKP ini Kelautan dan Perikanan ini tulang punggung kehidupan masyarakat Indonesia ya, banyak yang bergantung kehidupannya dari ikan, dari air gitu. Jadi ini mohon lebih apa diperhatikan secara komprehensif program 2020 sehingga sebuah apa kelembagaan yang ideal itu bisa dijalankan dengan baik. Walaupun ya tidak terlepas kita jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak sistem, eksekusi juga penting. Nah nanti kalau untuk eksekusi itu Bu Susi yang latar belakang menurut saya itu jago untuk diskusi. Tapi tetap kelembagaannya ... selalu apa dikualitasnya terus ditingkatin.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terakhir Pak Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih.

Pak Ketua, Ibu Menteri dan seluruh Eselon I, kemudian Kelautan dan Perikanan yang saya hormati.

Saya singkat saja Bu Menteri.

Pertama, setelah 4 tahun berjalan kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sebagai mitra dari Komisi IV DPR RI saya melihat bahwa konsolidasi internal yang dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini terutama regenerasi dan penggantian di Eselon I dan Eselon II itu telah sering dilakukan dan juga banyak yang ada PLT, dan ini saya melihat akan menghambat yaitu kinerja Kementerian ini gitu. Apalagi rekrutment yang dilakukan oleh Kementerian misalnya itu tidak diambil lebih dalam dari luar misalnya. Jadi saya rasa ini perlu dilakukan konsiderasi yang lebih intensif, yang lebih progresif. Kemudian juga yang memang job-nya sesuai nah untuk bagaimana mengaksimilasi program-program Kelautan dan Perikanan ini untuk kedepan saya rasa ini perlu dilakukan apa pembedahan-pembedahan, terutama mengaksimilasi internal di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Karena pengalaman kita selama saya duduk di Komisi IV DPR RI ini sudah kita ikuti dari sejak awal, dari Menteri pertama Pak Sarwono Kusumaatmadja dan selanjutnya itu ya apa tidak sedrastis ini penggantian-penggantian itu terjadi gitu. Jadi barangkali ini apa mungkin saya salah Bu Menteri yang saya amati ini begitu.

Terus yang kedua, APBN kita pagu indikatif yang untuk tahun 2020 yang akan datang itu kan sekitar 6 triliun lebih, 6 triliun lebih. Nah saya ingin tau porsi antara laut dengan daratan itu untuk menggarap sektor Perikanan kita itu berapa persentasenya. Laut berapa kemudian di darat berapa, karena saya melihat di darat ini kan potensial untuk pengembangan sektor perikanan ini. Misalnya potensi lele kita di Boyolali misalnya, kemudian kelompok-kelompok tani, peternak, kemudian eh bukan ikan, banyak sekali yang belum mendapatkan perhatian, terutama dari sisi penguatan modalnya begitu, dan yang terakhir saya rasa dibudidaya ini juga perlu diperhatikan secara intensif atensi kita itu seperti program PUM dulu kan cukup bagus itu sebetulnya, sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok ikan kita terutama di darat. Jadi itu barangkali singkat Bu Menteri.

Saya memberikan apresiasi kepada capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, baik berkaitan dengan masalah BPK misalnya yang sudah WTP ini cukup bagus, luar biasa cuman jangan lengah. WTP itu bukan akhir, WTP bukan berarti tidak ada sesuatu yang bocor-bocor, saya yakin ada gitu. Maka itu perlu dilakukan lebih intensif lagi terutama dari sisi akuntabilitas dan transparansi ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jadi barangkali itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Made Urip.

Bapak Ibu anggota sudah selesai semua ya, kebetulan Ibu Menteri tadi bicara kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya Bu Menteri ya dan rasa-rasanya bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah cukup.

Kami persilahkan kepada Ibu Menteri untuk meresponnya dipersilahkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih.

Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Mayoritas daripada pertanyaan-pertanyaan Anggota mungkin nanti saya akan jawab secara tertulis. Saya hanya meng-highlight aja beberapa hal tentang anggaran, tentang perikanan tuna sedikit dan juga tata kelola dan persoalan KPK tentang anggaran jadi sebetulnya tahun 2014 itu kita merencanakan KKP itui untuk di posisi sekitar 30 triliun ke atas. Makanya tahun pertama saya *start dengan* 13 T Pak, namun begitu melihat ke dalam kapasitas kita juga ternyata tidak tidak maksimum belum bisa kita maksimumkan dan kita terbukti dari beberapa persoalan kasus yang muncul dan waktu itu juga sebetulnya rencana saya ingin setiap tahun itu membagikan 3.000 kapal Pak. Jadi kalau 5 tahun kerja itu kurang lebih 15.000 kapal untuk mengakselerasi para nelayan kecil walaupun itu yang kita rencanakan adalah kapal-kapal kecil, kemudian kapal-kapal angkut itu yang rencana kita. Namun ee antara realita dan kejadiannya kita harus dengan *disclaimer* apalagi membuat kita terus me harus memnggetatkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam sehingga kapasitas kita bisa baik dan penyerapan anggaran bisa benar. Barangkali itu adalah hal yang kita inginkan.

Namun sebetulnya Bu Menkeu, Pak Presiden semua ingin kalau kita minta anggaran pasti dikasih dengan senang hati Pak, karena yang kita kembalikan saja 9,4 dalam 4 tahun terakhir. Jadi sayang sebetulnya Pak tapi ya ini adalah PR-nya KKP untuk meningkatkan kapasitas dalam hal penyerapan anggaran dan kualitasnya Pak. Karena kalau anggaran hanya sekedar habis ya nanti ada persoalan seperti contoh KPK yang terjadi kasus itu adalah sebelum saya ada, jadi tahun 2012, namun penggeledahan dan apa terjadi justru sekarang. Jadi itu juga yang membuat kita semua harus mawas diri bahwa kita harus betul-betul memperbaiki kualitas daripada pemakaian anggaran APBN kita. Dan tentang tata kelola organisasi kita sebetulnya dengan susiniasi yang dulu ingin digulirkan Pak Presiden, itu sebetulnya membuat efisiensi efektivitas daripada sumber daya manusia di Kementerian Kelautan dan Perikanan reorganisasi walaupun masih belum terjadi ada *golden handshake*, ada

recruitment cumlaude. Nah eksekusinya keliatannya baru akan mulai tahun ini dan tahun depan. KKP akan menjadi *pilot project* dan memang itu goal saya yang pertama.

Kemudian dari tuna itu yang beredar isu di lapangan bahwa kita itu turun, ya memang turun yang di RFMO, RFMO itu hanya mencatat kapal-kapal besar. Dulu kapal-kapal besar itu ya kapal-kapal asing yang berbendera Indonesia. Dengan adanya pelarangan kapal ex-asing otomatis jumlah kapalnya turun. Tapi bukan berarti tangkapan tuna kita turun, sekarang tuna-tuna itu ditangkap oleh kapal-kapal kecil ee small scale fisher ee fishing vessel yang tidak harus dicatatkan di RFMO. Dan dari data dunia kita memang pemasok tuna terbesar, bukan mengada-ada, itu sudah benar. Dan itu paradoks sebetulnya di Hendra Sugandi bicara di media seperti itu aneh. Karena ya dia harusnya tahu bahwa tuna yang ditangkap di Indonesia itu bukannya yang dicatat di RFMO saja, nelayan kecil juga menangkap tuna, dan itu adalah hak kita sebagai negara berdaulat atas laut kita. Dan perikanan ini satu-satunya yang menyumbang deflasi. Berarti kita tidak memukul inflasi, dan satu-satunya yang PDB-nya di sektor produksi itu naik di atas PDB nasional. Pajaknya juga naik hampir 300% lebih. Dan dengan dengan tata kelola yang lebih baik dan tentunya tata kelola ini akan menimbulkan sikap-sikap saya memohon dari semua pihak supaya sabar. Jadi ijin-ijin bukan kita persulit, memang kita sedang tata kelola apa seperti itu.

Tadi KPK saya sudah kasih jawaban, kemudian tentang monitoring kita monitoring juga dengan global fishing watch, selain itu juga setiap kapal juga ada transponder yaitu VMS. Apakah kita perlu ice itu kita nanti kaji bersama dengan perhubungan. Tapi sebetulnya kapal ikan sudah ada VMS. Setuju dengan Pak Ono. Tapi kalau dia keluar internasional memang harus ada ice, karena ice yang diakui oleh dunia internasional. Dan untuk bangkai kapal ya kalau bangkai kapal itu dimasukkan ke laut, tenggelam, itu jadi karang dengan sendirinya Pak. Tidak usah diapa-apain ya jadi karang. Namun kalau yang kapal-kapal bukan yang kita tenggelamkan itu pekerjaannya tidak ada di kita tapi di perhubungan itu adalah kelolaannya perhubungan, perhubungan laut jadi tidak ada di kami. Kapal kita akan coba terus, ini kalau kita terus WTP saya harapkan sih kita bisa naik kembali ke 13 triliun dikembalikan 30 triliun. Sebetulnya Perikanan ini sektor yang sangat menjanjikan, tapi sektor peningkatan kualitas SDM juga perlu di diperkuat. Kalau tidak ya nanti tata kelolanya anggaran besar tapi ngga karu-karuan. Ya itu yang saya khawatirkan Pak.

Tapi sebetulnya dari semua indicator Perikanan ini sangat luar biasa dari sisi inflasi kita justru deflasi, dari sisi nilai tukar kenaikannya itu 10% di atas pada saat semua slowing down. Pendapatan income di sektor lain turun, kalau di perikanan justru gila-gilaan. MTN usaha Perikanan kan naiknya 20% lebih, 20% itu dengan udah dikurangi inflasi jadi kan sebetulnya itu udah luar biasa. Lalu kemudian tentang yang PLT dan lain-lain, memang kita sedang rencana mereorganisasi organisasi kita Pak. Jadi Pemerintah kan memang berencana untuk merampingkan supaya ASN ini lebih

cepat larinya. Jadi dikurangi jumlah personilnya tapi ditingkatkan kualitasnya. Itu adalah PR pemerintah saya pikir.

Kira-kira seperti itu, kalau ada yang masih belum terjawab disini, Bapak dan Ibu semua saya akan berikan jawaban tertulis dikesempatan secepatnya dari sekarang, 1 minggu.

Terima kasih.

Akhirul Kalam

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri.

Saya rasa udah sangat jelas ya.

Pak Ono, udah jelas ya?

Berarti kita ke kesimpulan aja.

Coba Pak Toro naikkan kesimpulan.

Kesimpulan/Keputusan Rapat Kita Pada Hari Ini Adalah;

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opinin wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2018 dari Badan Pemerikasa Keuangan, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbesar serapan anggaran dengan meningkatkan kualitas kinerja sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

Gimana Bapak Ibu Anggota setuju?

Ibu Menteri?

Yang kedua, Komisi IV DPR RI menerima laporan,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Laporan keuangan KKP Pak itu sedikit, bukan Pemerintah Pusat.

KETUA RAPAT:

Yang di nomor?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Nomor 1 Pak.

KETUA RAPAT:

Nomor 1, laporan keuangan pemerintah pusat,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan Pemerintah Pusat.

KETUA RAPAT:

Iya ok coba dirubah.

Sudah ya Bu?

Yang kedua,

2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas tindak lanjut ikhtiar Hasil Pemeriksaan Sementara atau HAPSEM BPK Semester II tahun 2018 dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan keseluruhan HAPSEM BPK tahun 2018.

Bapak Ibu Anggota setuju?

Ibu Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

Tindak lanjut HAPSEM kan sama kita Pak.

KETUA RAPAT:

Iya Ibu Menteri kita.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Yang nomor 1 dulu, nomor 1 yang tadi coba yang sebelum perubahan yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, sebelum perubahan oleh Ibu Menteri Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2018.

Jadi semestinya harus Pemerintah Pusat bukan dari laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana topik yang ada di dalam laporan ini.

Bu ini adalah laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Oh oke kalau Bapak dapat itu sendiri ya?

Oke.

KETUA RAPAT:

Ibu pasti dapat juga kan ini ya?

Pak Irjen ya?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Jadi, oke silahkan.

INSPEKTUR JENDERAL KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.)

Eh Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Iya.

INSPEKTUR JENDERAL KKP (Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.M.)

Kalau yang itu kan ada juga yang WDP, ada yang justru (...) displema ada WDP. Kami-kami ini khusus kami WTP, jadi yang ini mestinya pasnya untuk KKP, LK kita sendiri. Kemaren tanggal 11 Juni disidangkan oleh Pak Arizalnya kepada kita.

KETUA RAPAT:

Oh jadi tetap sesuai dengan usulan Ibu Menteri.

Saya baca lagi nomor satu,

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Iya kira-kira begitu iya sepakat Bapak/Ibu sesuai dengan arahan Ibu Menteri?
(suara kaset terputus)

...apa namanya ... perubahan yang disampaikan oleh pihak Kementerian
sepakat?

Sepakat ya oke.

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua Ibu ada masukan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Hapsem itu kan sudah tidak ada lagi Pak karena sudah keluar BPJS nya. Jadi tidak ada lagi Hasil Laporan Sementara dari pemeriksaan Semester II 2019 kali.

KETUA RAPAT:

Masih Bu masih, masih sementara.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sementara dibuang Pak.

KETUA RAPAT:

Masih dalam pemeriksaan sementara.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Eenggak, sudah *final* Pak. Kan sudah BPP kita Pak.

KETUA RAPAT:

Iya silakan-silakan Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Hapsem itu singkatannya (Hasil Pemeriksaan Semester) Pak bukan Sementara.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Iya Bapak Ibu anggota sepakat? Pak Ono sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Yang ketiga,

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 s.d. 13 Juni 2019 sebesar Rp1.907.929.654.755,00 atau 34,76% dari pagu APBN tahun 2019 sebesar Rp5.483.013.679.000,00.

Bapak Ibu anggota setuju?
Ibu Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Hasanudin.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Sekarang sudah bulan Juni ya?

Juni, Juli, Agustus, September, selesai. Realisasi baru 34,76% dari pagu APBN tahun 2019 sebesar 5 triliun, kira-kira nanti sampai September berapa capaian Bu ya, sekarang sudah bulan Juni baru 34,76%, apa salah apa gimana?

KETUA RAPAT:

Iya silakan Ibu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Nasional masih 30-an juga Pak.
Mudah-mudah sih minimal 75-85% lah Pak.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih.

Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin bahwa kemitraan kita ini nanti akan berakhir pada tanggal 30 September karena setelah itu nanti tanggal 1 Oktober teman-teman DPR RI yang baru akan dilantik, dan setelah itu tanggal 20 Oktober itu pelantikan dari pada Presiden, dan selanjutnya ada pembentukan kabinet. Jadi ini menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin dalam rangka memberikan aksentuasi terhadap capaian dari pada Kementerian KKP.

Kemarin juga Kementerian Pertanian juga hanya 20,40 sekian persen. Kalau hari ini 34,76% ini perlu kita memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri ya. Tepuk tangannya agak kuat jangan malu-malu ya karena tepuk tangan ini bukan saja untuk capaian fisik dan keuangan 34%, ini tapi sekaligus juga untuk capaian WTP yang didapatkan. Karena kemarin kan 2015 16 ya Bu ya, eh 16 17 itu kan *disclaimer* seperti itu.

Oke kita masuk pada nomor 4.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu indikatif APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKK K/L dan RKP K/L tahun 2020 sebesar Rp6.472.754.539.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dengan komposisi program per Eselon I sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp523.623.761.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp77.267.955.000,00;
 - c. Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp726.554.240.000,00;
 - d. Dirjen Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.664.614,00;
 - e. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.062.575.107.000,00;
 - f. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp366.017.696.000,00;
 - g. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp507.850.023.000,00;
 - h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.868.216.557.000,00 dan;
 - i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan sebesar Rp601.075.586.000,00.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendalaman untuk membahas berdasarkan program dan kegiatan secara lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor 4 Bapak Ibu Anggota setuju?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A.S., M.Si.):

Sebentar Pak.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Walaupun pembahasan sidang yang berikutnya mungkin kita akan membahas demikian sesuai dengan beberapa tanggapan dari kawan-kawan meminta atau memohon kepada Bu Menteri untuk menambah anggaran tersebut sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian, apakah nanti dibahas selanjutnya?

KETUA RAPAT:

Kita akan masuk dalam pendalaman dengan Eselon I.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Penambahan atau pendalaman saja?

KETUA RAPAT:

Iya sesuai konteks, sama sama Pak.
Yang 6 triliun ini kan?
Semuanya ditambah.
Oke Bapak Ibu Anggota setuju?
Ibu Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Poin 5.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di beberapa propinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Setuju Bapak Ibu?
Ibu Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Yang ke 6 terakhir.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik serta akuntabel di setiap program-program untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dari pelaku utama Kelautan dan Perikanan dalam hal ini; (Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta Pengelola dan Pemasar Hasil Perikanan).

Bapak Ibu sepakat?
Ibu Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Dengan demikian hasil rapat kerja kita dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari ini dapat kita selesaikan dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami persilakan Ibu Menteri untuk menyampaikan kata penutup mengakhiri dari pada Raker kita pada siang hari ini.

Kami persilakan Ibu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas diskusinya seluruh RKA K/L dari Rapat Kerja kita hari ini untuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, dan semoga kerjasama ini terus berlanjut, dan *support* dari Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa melaksanakan program-program pembangunan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan baik.

Terima kasih.

Akhirul kalam

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kalau memang tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan maka pada rapat kesempatan hari ini kami nyatakan ditutup.

**(KETOK 3X)
(RAPAT DITUTUP)**

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, 18 Juni 2019

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001